



## **Covid-19 sebagai Bencana Global Abad-21: Tinjauan Disaster Diplomacy**

Laode Muhamad Fathun

UPN Veteran Jakarta, Indonesia; laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id

Mega Dwifarahani

UPN Veteran Jakarta, Indonesia; mega.dwifarahanni@gmail.com

| Submit: 29-01-2023

| Accept: 06-08-2023

| Publish: 31-08-2023

### **Keywords**

*COVID-19, Disaster  
Diplomacy, Global  
Disaster, Global Health  
Cooperation.*

### **ABSTRACT**

*The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the world, in health, economic to political and socio-cultural sectors. The widespread of the corona virus has caused many conflicts between countries in health and economic crises globally. This research was conducted to explain that the pandemic experienced in the 21st century is a global disaster which has spawned a series of opportunities for cooperation between international countries to defeat the COVID-19 pandemic. This research is qualitative using the perspective of disaster diplomacy. The data collection technique is literature study with stages in the form of collecting data, selecting the data and drawing conclusions. From the research results it is known that the global disaster caused by COVID-19 does not only have a negative impact, but opens opportunities for international countries to cooperate with each other in dealing with a pandemic through disaster diplomacy. Cooperation between international countries must continue to be carried out to achieve a common goal, ending the COVID-19 pandemic.*

### **Kata Kunci**

**COVID-19, Diplomasi  
Bencana, Bencana Global,  
Kerjasama Kesehatan  
Global.**

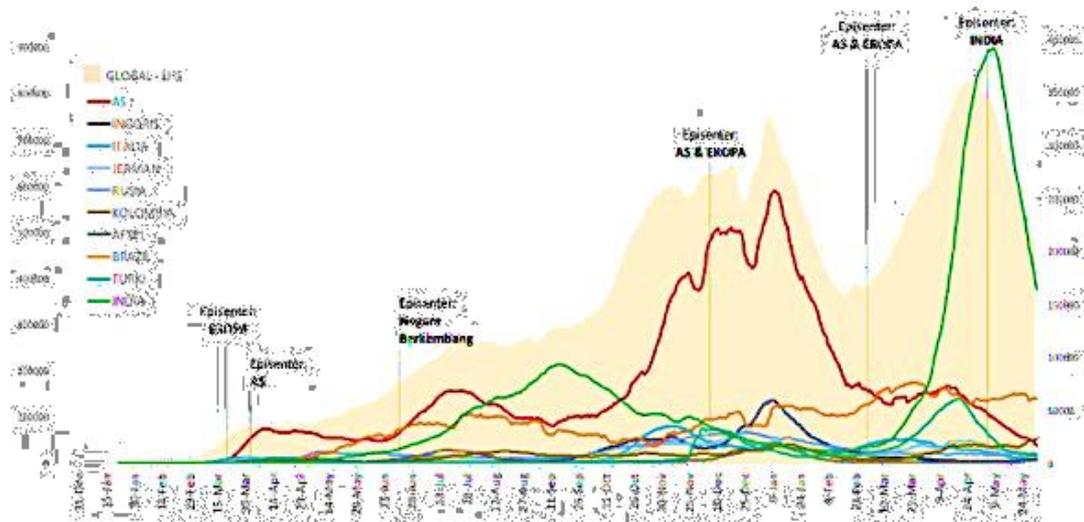
### **ABSTRAK**

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan di dunia, baik dari sektor kesehatan, ekonomi hingga politik dan sosial budaya. Maraknya penyebaran virus corona telah menimbulkan banyak konflik antar negara dan krisis kesehatan dan ekonomi secara global. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bahwa pandemi yang terjadi pada abad 21 ini merupakan sebuah bencana global yang telah melahirkan rangkaian kesempatan untuk bekerja sama antar negara internasional guna mengalahkan pandemi COVID-19. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan perspektif diplomasi bencana. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka dengan tahapan berupa melakukan pengumpulan data, menseleksi data yang terkumpul dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bencana global yang disebabkan oleh COVID-19 tidak hanya memberikan dampak negatif, namun membuka kesempatan bagi negara internasional untuk saling bekerja sama dalam menghadapi pandemi melalui diplomasi bencana. Kerja sama antar negara harus terus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mengakhiri pandemi COVID-19.

## PENDAHULUAN

Pandemi merupakan sebuah wabah penyakit yang menyebar secara luas dan serentak di berbagai pelosok dunia. Pada tahun 2020, *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan *Corona Virus Disease* atau COVID-19 sebagai *Global Pandemic* (Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19 di Indonesia, 2022). Hal tersebut diputuskan karena jangkauan penyebaran virus yang telah mencapai hampir keseluruhan kawasan di dunia. Secara global, jumlah kasus COVID-19 telah mencapai 663 juta kasus dengan total 6 juta kasus kematian di dunia (Covid 19 Indonesia, 2023). Virus corona merupakan sebuah kumpulan virus yang menyerang bagian pernafasan manusia, virus ini bisa berbentuk seperti flu namun bila parah, maka virus ini dapat menyebabkan radang paru-paru (*pneumonia*) hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapapun, baik anak-anak hingga lansia.

Gambar 1. Grafik Trajektori Pandemi COVID-19 di Berbagai Negara Tahun 2020



Sumber: World of Meter (2020)

Laju pertumbuhan kasus COVID-19 juga menimbulkan dampak dalam kehidupan sosial masyarakat dunia, karena maraknya penyebaran virus corona, masyarakat dunia diharuskan untuk melakukan rangkaian perubahan kegiatan sehari-hari untuk menghindari dari pemaparan virus corona. Program yang disebut *social distancing* diluncurkan oleh *World Health Organization* untuk mendorong pemutusan rantai penyebaran virus. Program ini meliputi dilakukannya pendidikan dan kegiatan kerja secara luring, pengurangan jumlah akses ke rangkaian tempat wisata, seperti mall, restoran dan lainnya. Karena adanya penyebaran virus corona yang sangat marak, rangkaian kegiatan sosial menjadi sulit untuk dilakukan bagi masyarakat dunia karena adanya ketakutan akan terjangkit virus tersebut. Maka dari itu, masyarakat dunia pun lebih memilih untuk melakukan kegiatan sehari-harinya di rumah secara *online* dan menghindari keramaian. Bahkan ada beberapa negara yang melakukan strategi *lockdown* untuk menghindari peningkatan penyebaran virus corona. Strategi tersebut dilakukan dengan cara menutup akses masuk dan keluar bagi orang-orang yang sedang berada di suatu kawasan karena adanya situasi darurat. Negara yang melakukan strategi ini meliputi Tiongkok, Spanyol, Italia, Malaysia, Filipina dan masih banyak lagi.

Strategi *lockdown* yang dilakukan pertama kali oleh Tiongkok memiliki tujuan utama untuk mengurangi penyebaran virus corona, namun strategi ini juga menimbulkan efek samping bagi perkembangan ekonomi negaranya yang kemudian berkembang ke ketidakpastian ekonomi global. Dampak ekonomi mulai terlihat dari terjadinya penurunan yang signifikan dalam penjualan ritel, produksi perusahaan dan kegiatan investasi baik domestik maupun internasional serta pariwisata

(Christian & Hidayat, 2020). Karena strategi *lockdown* turut diikuti oleh banyak negara lain di dunia, maka terjadilah penurunan kondisi ekonomi dunia.

Pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan ketegangan diplomatik. Salah satu ketegangan terjadi antara China dengan Amerika Serikat, dimana dengan meningkatnya angka penyebaran virus corona di China yang merupakan negara pertama yang terpapar virus tersebut, Amerika Serikat mulai berencana untuk mengurangi aktivitas perdagangan dan kerja sama dengan China. Maraknya penyebaran virus corona telah menciptakan ketegangan diplomatik di dunia yang didorong dengan terjadinya krisis ekonomi di banyak negara. Angka penurunan ekonomi mengalami degradasi selama berjalannya virus corona sejak tahun 2019, namun pada tahun 2021, beberapa negara di ASEAN telah berhasil mengalami peningkatan walaupun tidak tinggi sesuai harapan. COVID-19 telah merombak wajah ekonomi dunia secara drastis, yang dimana bermula dimana ekonomi dunia dianggap sedang menjalani jalan dan proses peningkatan yang baik dan optimal namun dengan cepat berubah menjadi resesi dan krisis ekonomi global (Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi Global 2020, n.d.).

**Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Negara G-20 dan ASEAN**



Sumber: Kementerian Luar Negeri Indonesia (2020)

Namun, pandemi yang berdampak luas ini juga telah membuka perspektif baru terkait kerja sama nasional dan internasional kerja sama dalam menghadapi krisis global (Taghizade, Chattu, Jafaaripooyan, & Kavany, 2021). Pandemi COVID-19 telah menunjukkan kerentanan sistem kesehatan dunia yang kemudian menyebar ke sektor lainnya, seperti ekonomi, politik hingga sosial. Menyadari akan pentingnya permasalahan pandemi dan bencana global yang telah ditimbulkan, untuk memastikan seluruh negara di dunia untuk mengutamakan mencari cara paling efektif guna mengakhiri pandemi dan menemukan solusi selama era pemulihan dari COVID-19, organisasi pemerintah internasional, Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) mengusulkan perjanjian pandemi atau *pandemic treaty* yang akan diratifikasi dan disahkan pada tahun 2024 (Consilium Europa, 2023). Usulan perjanjian ini menjadi salah satu perjanjian yang paling cepat dan banyak disetujui oleh anggota PBB dalam sejarah (Nikogosian & Kickbusch, 2021).

Pengusulan perjanjian oleh PBB telah menunjukkan peran penting hubungan internasional dalam era pandemi global COVID-19. Setiap bencana selalu memiliki dampak negatif, namun juga terdapat dampak positif di sisi lainnya. Dengan adanya bencana global yang diciptakan oleh COVID-19, negara-negara internasional dapat mengedepankan persatuan dan kerja sama global guna melawan krisis sosial, ekonomi dan politik yang telah tercipta.

Penyebaran virus corona pada tahun 2023 telah mengalami penurunan, namun perperangan belum selesai, perjuangan dalam pemulihan ekonomi politik tetap berlanjut dan harus dilakukan bersama. Dari seluruh negara di dunia, terdapat 10 negara yang hingga saat ini tidak memiliki kasus

corona, contohnya Negara Palau. Sejak awal virus menyebar, negara tersebut telah menghentikan akses masuk warga luar untuk berkunjung ke negara Palau yang menghasilkan tidak adanya kasus corona. Namun, hal itu tidak membuat negara Palau tidak terkena dampak pandemi COVID-19. Penurunan pendapatan ekonomi di negara Palau akibat pengurangan turis yang datang ke menimbulkan krisis ekonomi dan peningkatan angka pengangguran. Dampak pandemi COVID-19 bersifat jangka panjang sehingga kerja sama dalam masa pemulihan sangat dibutuhkan di seluruh negara internasional.

Bencana merupakan sebuah peristiwa yang mengancam kehidupan manusia yang mengakibatkan korban jiwa, kerugian harta dan lain sebagainya (Badan Penanggulangan Bencana Nasional, n.d.). Namun, dalam tiap bencana tidak hanya timbul dampak negatif, namun tiap bencana juga dapat menjadi kesempatan baru untuk meningkatkan persatuan dan kerja sama.

Pandemi COVID-19 merupakan sebuah bencana yang memiliki dampak yang signifikan terhadap seluruh negara di dunia. Tidak hanya merugikan dalam bidang kesehatan, namun dampak pandemi telah meluas ke bidang-bidang lainnya yang akhirnya menimbulkan krisis ekonomi politik secara global. Dampak yang signifikan secara global inilah yang menjadi titik pusat dari besarnya peran kerja sama global untuk mengatasi COVID-19 yang merupakan bencana global.

Kekurangan keperluan alat kesehatan seperti masker, alat bantu pernafasan yang menimbulkan banyaknya perebutan di negara-negara dunia menjadi salah satu alasan mengapa kerja sama global menjadi tombak utama untuk saling membantu dalam melewati era pandemi (Lister, Shukla, & Bobille, 2020). Perjuangan untuk menemukan vaksin virus corona juga telah mendorong terjadinya diplomasi atau kerja sama antar negara dengan cara saling menukar informasi mengenai COVID-19 dan penelitian terkait proses pembuatan vaksin serta pertukaran atau distribusi vaksin antarnegara. Untuk mengatasi bencana global pandemi COVID-19, persatuan dan kerja sama antar negara internasional menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan. Berbagai kerja sama telah dilaksanakan sejak timbulnya virus corona di dunia, baik secara bilateral, multilateral atau global.

Contoh kerja sama bilateral yang telah melakukan kerja sama di era pandemi adalah Jepang dan Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak secara virtual pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan tujuh bidang utama dalam *memorandum of cooperation* yang ditetapkan, yaitu bidang Farmasi dan Alat Kesehatan; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Layanan Kesehatan; Teknologi Informasi Kesehatan; Layanan Perawatan Lansia; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Serta Kesehatan Lingkungan (Rokom, 2020). Kerja sama ini mendapatkan respon positif dari masyarakat dan pemerintahan Indonesia karena kurangnya sumber daya alat kesehatan yang dimiliki oleh Indonesia. Kerja sama ini juga dilakukan untuk mendorong persahabatan dan kerja sama antara Jepang dan Indonesia di masa kelam yang akan bertahan hingga kemudian nanti.

Krisis ekonomi tidak hanya terjadi di berbagai negara, namun hampir seluruh negara di dunia, begitu juga dengan negara-negara Kawasan Asia Tenggara. Menyadari akan tingginya tingkat krisis ekonomi yang terjadi, organisasi regional ASEAN atau *Association of South-East Asian Nation* mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dengan tiga bidang utama, yaitu Stimulus ekonomi, Kebijakan fiskal dan Moneter, serta Kebijakan Perdagangan. Namun kebijakan tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi negara anggota. Karena itu, ASEAN melakukan kerja sama dengan negara Asia Timur, yaitu China, Korea Selatan dan Jepang melalui *ASEAN Plus Three (APT)*, yang merupakan sebuah forum kerja sama ASEAN yang tercipta pada tahun 1997 saat negara-negara Asia sedang tertimpa krisis ekonomi (Febreani, 2015). Kerja sama dengan tiga negara tersebut dilakukan dengan landasan pengalaman yang lebih dahulu dimiliki oleh ketiga negara tersebut dengan COVID-19. Tidak hanya itu, ASEAN dan China juga melakukan kerja sama dalam ekonomi digital yang mengalami peningkatan penggunaan selama pandemi berlangsung. Kerja sama ini bertujuan untuk memperdalam kerja sama terkait perdagangan, ekonomi digital, kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi antar negara-negara anggota ASEAN dengan China yang disahkan dalam kegiatan *The 23rd ASEAN-China Summit* pada 12 November 2020.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Diplomasi Bencana**

Diplomasi bencana dipahami sebagai studi tentang bagaimana dan mengapa bencana alam berkontribusi terhadap atau tidak terhadap perdamaian atau konflik, yang diteliti sebelum dan setelah sebuah bencana. *Disaster Diplomacy* melihat pencegahan, mitigasi, dan mengurangi kerugian, kemudian mencoba untuk berurusan dengan hal-hal yang berada di tempat sebelum kejadian terjadi. Sebaliknya, dalam hal melihat apa yang terjadi setelah itu, hal ini lebih berfokus untuk melihat tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi. Patrizia I. Duda dan Ilan Kelman, dalam karyanya berpendapat bahwa diplomasi bencana dapat mempengaruhi kerjasama atau konflik yang dimiliki suatu negara dengan negara yang lainnya (Duda & Kelman, 2022).

Selain itu, Gina Yannitell Reinhardt dan Carmela Lutmar menjelaskan secara rinci terkait tiga hal utama mengenai diplomasi bencana, (1) *Disaster as endogenous social phenomena*, (2) *Disasters as process*, dan (3) *Co-determination of disasters, conflict and cooperation* dengan menggunakan kasus COVID-19 sebagai contoh utamanya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat antara bencana dan diplomasi yang dicapai menggunakan tiga teori yang telah disebutkan. Dengan pemahaman bahwa bencana dapat membuka banyak kemungkinan untuk mencapai kerja sama dalam lingkup domestik maupun internasional, dan tidak hanya menghasilkan konflik, negara – negara dapat menemukan solusi dan cara yang lebih baik secara kesatuan dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat bencana yang terjadi, seperti COVID-19.

## **METODE RISET**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk melihat suatu perkara sosial secara mendalam, ditelusuri prosesnya dan menarik kesimpulan. Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bahwa bencana global COVID-19 tidak hanya membawa kerugian bagi dunia, namun membuka kesempatan yang luas bagi negara internasional melalui perspektif diplomasi bencana. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dari berbagai sumber yang factual, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian dan lainnya. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data secara konkret dan membuat kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Diplomasi Bencana Melalui Kerja sama Kesehatan Global**

Diplomasi dan bencana adalah dua aspek yang berbeda. Bencana identik dengan sesuatu yang diratapi, kesengsaraan, kehancuran, kesulitan dan implikasi negatif lainnya. Bencana menjadi sesuatu yang menakutkan karena sering menimbulkan kerugian ekonomi, sosial dan budaya serta politik. Bencana adalah sebab tidak berjalannya suatu sistem alam maupun sistem sosial. Itu artinya bencana bisa dimaknai secara sosial dan secara alamiah. Bencana dalam makna alamiah adalah bencana yang ditimbulkan oleh alam dari manapun sebabnya baik tsunami, banjir, gempa bumi, kebakaran, dan bencana lainnya. Selain itu, bencana sosial adalah bencana yang terjadi dalam siklus sosial yang membuat tidak berjalannya sistem sosial dengan baik. Bentuknya bisa berupa konflik, kesalahan persepsi, perang, kelaparan, kemiskinan, dan bencana sosial lainnya.

Penelitian Louise K. Comfort menyebutkan bahwa isu bencana saat ini menjadi isu yang sangat krusial bagi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia. Bencana harus didefinisikan secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada isu bencana alam tetapi juga bencana penyakit menular yang berdampak global seperti mewabahnya *Avian Influenza*, *Swine Flu*, atau isu pemanasan global (Fathun, 2016) (Comfort, 2002).

Sementara itu, diplomasi menurut Wight dianggap sebagai mesin hubungan internasional yang menjadi media komunikasi antar aktor hubungan internasional (Carlsnaes, 2013). Selain itu diplomasi juga dianggap sebagai seni dalam hubungan internasional karena diperankan oleh representatif negara untuk mencapai kepentingan nasional dengan mekanisme negosiasi (Nicolson, 1974). Dan diplomasi juga adalah strategi dalam dalam mencapai kepentingan nasional yang selalu dimaknai dengan *soft power*. Carlsnaes mengungkapkan ada sekitar 300 definisi tentang diplomasi dalam hubungan internasional yang dimaknai oleh masing-masing ahli (Carlsnaes, 2013). Namun dapat dimaknai bahwa diplomasi sebagai seni dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan masing-masing aktor baik aktor negara maupun aktor non negara dengan cara-cara persuasi atau jalan damai. Lebih lanjut, diplomasi dapat dibagi dalam empat komponen yakni diplomasi sebagai komunikasi, diplomasi sebagai negosiasi, diplomasi sebagai advokasi dan diplomasi sebagai jebakan tersembunyi.

Lebih lanjut, diplomasi tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas aktor hubungan internasional untuk membuat dan melakukan kerja sama luar negeri. Hal ini didasarkan untuk melakukan kerja sama dibutuhkan media komunikasi, negosiasi untuk memfasilitasi tercapainya kepentingan aktor. Diplomasi bencana hanyalah satu instrumen yang menjadi, namun tulisan ini memberikan argumentasi diawal bahwa bukan harus ada bencana kemudian tercipta hubungan internasional dan kerja sama luar negeri. Namun kerja sama dalam bidang kebencanaan melalui diplomasi bencana akan meningkatkan solidaritas sosial, kepekaan sosial dan identitas kolektif secara sosial. Diplomasi bencana adalah media untuk merekatkan kembali simpul implikasi bencana sehingga bencana bukan menjadi sesuatu yang diratapi atau dihindari. Artinya manajemen bencana harus disiapkan, kerja sama harus dikuatkan dan kolaborasi harus ditingkatkan. Bencana memunculkan kesadaran sosial untuk saling bersinergi dan membantu. Bencana memunculkan tindakan positif. Bencana adalah tradisi alam atau bagian dari konstruksi manusia.

Fokus tulisan ini adalah membahas bencana dalam bidang sosial politik bukan bencana yang disebabkan oleh alam. Bencana yang dimaksudkan adalah bencana wabah Covid19 sebagai pandemi global yang membuat masyarakat global kewalahan untuk mengatasinya. Covid 19 bersifat transmisi karena penyebarannya sangat massif dan membuat implikasi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Covid 19 menandai masuknya isu biologi dalam kajian studi hubungan internasional. Covid 19 adalah penyakit menular dalam tubuh manusia sehingga menyebabkan tubuh manusia terganggu, mulai dari pernafasan hingga menyebabkan kematian. Transmisi dan penyebaran Covid 19 bukan hanya menjadi persoalan lokal namun menjadi bencana global. Artinya walaupun covid 19 menjadi masalah global tetap saja eksekusinya di level lokal.

Bencana Covid 19 sebagai penyakit menular yang berstatus pandemik bukan menjadi awal yang membuat hubungan antar negeri kesulitan. Sebelumnya sudah ada penyakit flu burung, flu babi, virus HIV/AIDS, penyakit TBC dan lainnya. Namun efek dari sejumlah penyakit di atas tidak menimbulkan efek yang diderita di semua negara. Di sisi lain, bencana Covid 19 justru membuat hubungan internasional terkendala yang dilakukan sebagian besar melalui *online*. Transmisi penyebaran virus covid 19 sebagai bencana global juga menyita perhatian dari pemerintah daerah, NGO, IGO, pengusaha, individu dan lainnya. Sebab Covid 19 tidak memilih status dan profesi dalam transmisi penyebarannya. WHO juga mengingatkan bahwa ancaman penyebaran penyakit menular menjadi masalah ancaman terhadap stabilitas global (Amanda Moodie and Nima Gerami, 2021).

Weizhun M yang penelitiannya dilakukan di Tiongkok menyimpulkan bahwa ternyata penanganan bencana yang baik dapat menimbulkan simpati dari banyak pihak dan dapat membuka peluang kerja sama internasional yang dilakukan oleh beberapa pelaku hubungan internasional. Selain itu, Weizhun berkata praktik diplomasi bencana memiliki pengaruh dan nilai aktual yang besar dalam meningkatkan kepentingan nasional dan internasional (Weizhun, 2005).

Dari kasus Tiongkok dapat dipelajari bahwa diplomasi bencana bersifat fleksibel dan beragam namun tidak pasti dan ada beberapa batasan dalam proses praktik diplomasi. Diplomasi bencana juga dapat mempromosikan peran Tiongkok sebagai negara yang bertanggung jawab dan kuat. Praktik diplomasi bencana memiliki pengaruh dan nilai aktual yang besar dalam meningkatkan kepentingan nasional dan internasional. Diplomasi bencana bersifat fleksibel dan beragam namun tidak pasti serta ada beberapa batasan dalam proses praktik diplomasi. Diplomasi bencana juga dapat mempromosikan peran Tiongkok sebagai negara yang bertanggung jawab dan kuat (Fathun, 2016).

Berikut ini adalah data penyakit yang menjadi bencana global namun menjadi peluang kerja sama global yang intens.

**Tabel 1. The Kind of Global Disease Impact**

<i>World</i>	<i>Deaths in Millions</i>	<i>Percentage of deaths</i>
<i>Ischemic heart disease</i>	<i>7.25</i>	<i>12.8</i>
<i>Stroke and other cerebrovascular disease</i>	<i>6.15</i>	<i>10.8</i>
<i>Lower respiratory infections</i>	<i>3.46</i>	<i>6.1</i>
<i>Chronic obstructive pulmonary disease</i>	<i>3.28</i>	<i>5.8</i>
<i>Diarrheal diseases</i>	<i>2.46</i>	<i>4.3</i>
<i>HIV/AIDS</i>	<i>1.78</i>	<i>3.1</i>
<i>Trachea, bronchus, lung cancer</i>	<i>1.39</i>	<i>2.4</i>
<i>Tuberculosis</i>	<i>1.34</i>	<i>2.4</i>
<i>Diabetes Mellitus</i>	<i>1.26</i>	<i>2.2</i>
<i>Road traffic accidents</i>	<i>1.21</i>	<i>2.1</i>

Sumber: WHO on (Colin Mcinnes, 2012)

**Tabel 2. The Kind of Global Disease Model Actions**

<i>Global Health Problem</i>	<i>Biomedical Model</i>	<i>Social Medicine Model</i>
<i>Pandemic Influenza (H5N1)</i>	<i>Treatment by anti-viral drugs and prevention by development and implementation of vaccines</i>	<i>Compensation schemes to poultry farmers, regulation of animal husbandry practices, reform of production and distribution of anti-viral and vaccine supplies</i>
<i>HIV/AIDS</i>	<i>Development of anti-retroviral therapies, clinical guidelines to treat co-infections (e.g, tuberculosis and HIV/AIDS)</i>	<i>Strategies for reducing engagement in risky behaviors by vulnerable population groups, education to reduce social stigma.</i>
<i>Tobacco control</i>	<i>Analysis of nicotine receptors in the brain, development of therapies that interfere with nicotine addiction</i>	<i>Restrictions on tobacco marketing, advertising, and promotion; youth smoking prevention programs</i>

Sumber: (Colin Mcinnes, 2012)

Tabel di atas menyajikan pendekatan yang berbeda ini sebagai jalur kebijakan yang berbeda, dalam praktiknya, sebagian besar kebijakan kesehatan masyarakat berupaya menggabungkan elemen keduanya. Apa yang penting untuk dipahami dalam membandingkan dua perspektif yang sangat berbeda ini, bagaimanapun, adalah bahwa model kesehatan yang berbeda tidak hanya memprioritaskan masalah yang berbeda tetapi juga dapat mengesampingkan beberapa masalah dan beberapa di luar diskusi. Kemampuan untuk melakukan ini dapat dikenali sebagai bentuk kekuatan-kekuatan ideasional. Ini menyangkut kekuatan ide untuk membentuk pemahaman kita tentang dunia, dan kekuatan untuk mempromosikan rasa tentang apa yang alami atau masuk akal, sehingga terkadang kita bahkan tidak menyadari pilihan yang kita buat.

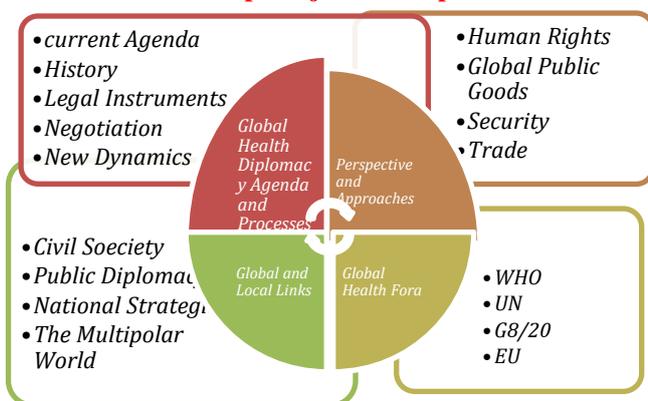
Pendekatan di atas adalah upaya untuk mengidentifikasi pembagian kerja yang rasional di antara inisiatif kesehatan global berdasarkan keunggulan komparatif dari pemain yang berbeda. Jamison dan lain-lain. membedakan antara fungsi-fungsi inti, yang melampaui kedaulatan satu negara bangsa manapun, dan termasuk promosi barang publik internasional (misalnya, penelitian dan pengembangan), pengawasan dan pengendalian eksternalitas internasional (misalnya, risiko lingkungan dan penyebaran patogen) dan fungsi pendukung yang menangani masalah yang terjadi di masing-masing negara, tetapi dapat membenarkan tindakan kolektif di tingkat internasional karena kekurangan dalam sistem kesehatan nasional (Colin Mcinnes, 2012).

Isu kesehatan internasional berfokus pada penyakit yang tersebar di berbagai wilayah negara dengan populasi geografis, terutama di negara tropis dunia ketiga yang memiliki dampak sosial dan ekonomi. Isu kesehatan internasional juga menekankan pada isu respon kebijakan masing-masing negara dan relevansi isu nasional tersebut dengan fenomena global. Selain itu, fokus masalah kesehatan menyangkut penyebaran penyakit secara geografis baru, munculnya infeksi baru, peningkatan resistensi obat, perubahan epidemiologi pola dan pandemi kesehatan dan penyakit, inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi global yang mempengaruhi kesehatan, perubahan dalam pola perilaku manusia yang berkaitan dengan kesehatan, restrukturisasi global industri yang berhubungan dengan kesehatan, dan inovasi dalam mekanisme kelembagaan untuk tindakan kolektif terhadap kesehatan. (Colin Mcinnes, 2012) (Ilona Kickbusch, 2013) (Sara E Davies, 2015) (Thomas E Novontny, 2013).

Hal yang harus disadari dari keberadaan virus corona ini adalah membutuhkan kerja sama global. Penyebaran virus corona bukanlah keinginan dari pemerintah Tiongkok sendiri namun tentunya hal ini harus disikapi secara bijak dengan melakukan kerja sama berbasis kemanusiaan. Hasil peninjauan membuahkan argumen ketika dunia dalam keadaan bencana yang menimpa umat manusia, ego nasional atau kepentingan politik lebih rendah daripada kepentingan umat manusia. Penyebaran virus ini harus disikapi bersama karena akan menimpa banyak negara. Dengan demikian, bencana global ini merupakan peluang kerja sama global untuk meredakan konflik dan ketegangan global antar negara besar. Lebih lanjut, Kelman menyatakan bahwa keberadaan bencana dapat meredakan konflik antar aktor yang berkonflik. Karena mereka memiliki pemikiran yang sama mengenai bencana yang menimpa sehingga masing - masing aktor akan saling menarik diri untuk melakukan konfrontasi (Kelman, 2012).

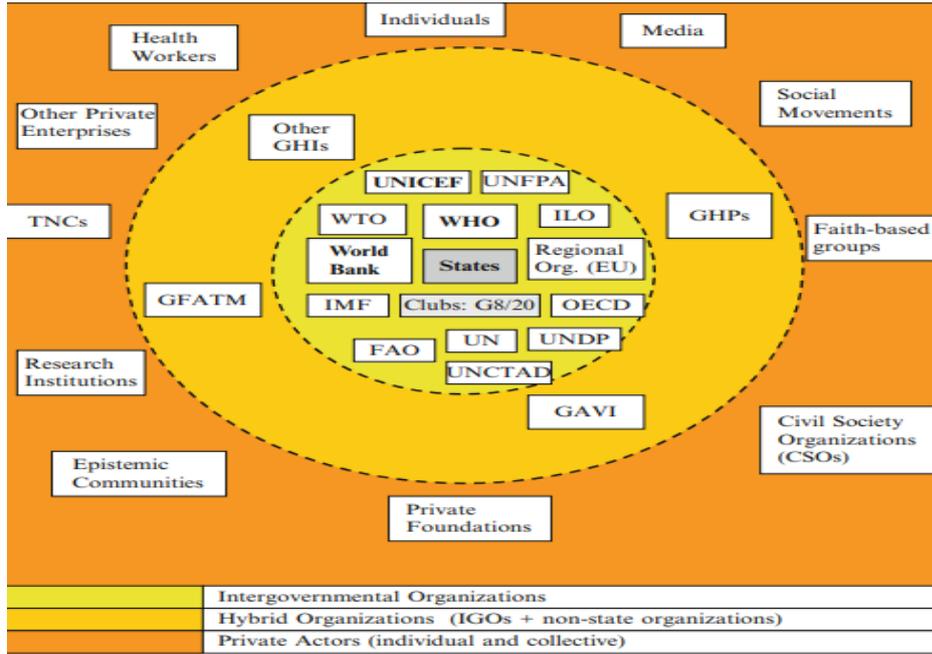
Berikut pola kerja sama global dalam mengatasi masalah kesehatan:

**Gambar 3. Konsep Kerja Sama Diplomasi Kesehatan Global**



Sumber: (Babulal Sethia, 2019) (Sara E Davies, 2015).

**Gambar 4. Model of Multilateralism of Implementation Cooperation of Health Security**



Sumber: (Ilona Kickbusch, 2013) (Babulal Sethia, 2019) (Sara E Davies, 2015).

David Fidler mencirikan sistem *Global Health Governance* sebagai bentuk “anarki sumber terbuka”, yang memperluas dan memperdalam dasar normatif untuk tindakan kesehatan global. Artinya, ruang interaksi antar masyarakat bangsa tidak lagi didominasi oleh hubungan antar negara. Hubungan transnasional tidak diperas ke dalam aturan diplomatik dan cara tradisional untuk menekan negara lain melalui penerapan politik kekuasaan atau melalui mekanisme organisasi internasional yang rumit. Aktor dapat menggunakan kekuatan khusus mereka untuk mencapai tujuan mereka (sumber daya keuangan dan ahli, wacana dan menggunakannya untuk memobilisasi dukungan, termasuk pengaruh pada proses pembuatan hukum internasional). Jaringan transnasional antara aktor berorientasi kesehatan telah terbentuk yang berfokus pada isu-isu spesifik (seperti akses ke obat-obatan, penyakit terlanjar, dan pengendalian tembakau) yang merupakan jaringan hubungan sosial global yang kompleks terkait dengan isu kesehatan global (Ilona Kickbusch, 2013).

Berikut adalah tugas masing-masing aktor dalam isu bencana Kesehatan global:

**Tabel 3. Organisasi Internasional dalam Kerja Sama Kesehatan Global**

<b>Institution</b>	<b>Plenary body</b>	<b>Membership</b>
<b>WHO</b>	World Health Assembly	Delegations (led by Minister of Health) of 192 member states which each hold one vote in decision making.
<b>World Bank</b>	Board of Governors	Governors (Minister of Finance) appointed by 187 member countries, who hold decision-making power based on shares of World Bank stock held.
<b>UNICEF</b>	Board of Directors	Mixture of donor and recipient countries
<b>UNAIDS</b>	Executive Cabinet	Executive Director, the Deputy Executive Directors of the Programme branch and the Management and External Relations branch and the Director of the Executive Office
<b>Global Fund to fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria</b>	Global Fund Board	Representatives from donor and recipient governments, civil society, the private sector, private foundations, and communities living with and affected by the diseases
<b>Bill and Melinda Gates Foundation</b>	Management Committee and Leadership Teams	Bill Gates, Melinda Gates, Bill Gates Sr, Warren Buffett and eight appointed individuals
<b>Welcome Trust</b>	Board of Governors	Ten appointed individuals from the corporate sector and academia
<b>PEPFAR</b>	Office of the US Global AIDS Coordinator	Appointed head (ambassador)
<b>UNITAID</b>	Executive Board	One representative nominated from each of the five founding countries (Brazil, Chile, France, Norway, and the UK), and Spain; One representative of Asian countries; Two representatives of relevant civil society networks (nongovernmental organizations and communities living with HIV/AIDS, malaria or tuberculosis); One representative of the constituency of foundations; and One representative of the World Health Organization.

Sumber: The Role of Organization in Global health security (Colin Mcinnes, 2012) (Babulal Sethia, 2019)

**Tabel 4. Langkah dan Strategi Kerja sama Kesehatan Global dalam Mengatasi Bencana Kesehatan**

	<i>Stage 1 Norm Emergence</i>	<i>Stage 2 Norm Cascade</i>	<i>Stage 3 Internalization</i>
<i>Actor</i>	<i>Norm entrepreneurs with organizational platforms</i>	<i>States, international organizations networks</i>	<i>Law, profession, bureaucracy</i>
<i>Motives</i>	<i>Altruism, empathy, ideational commitment</i>	<i>Legitimacy, reputation, esteem</i>	<i>Conformity</i>
<i>Dominant mechanisms</i>	<i>Persuasion</i>	<i>Socialization, institutionalization, demonstration</i>	<i>Habit, institutionalization</i>

Sumber: (Sara E Davies, 2015)

Berdasarkan pola, peran dan langkah-langkah kerja sama kesehatan yang memaknai bahwa isu kesehatan sebagai masalah dan bencana global menunjukkan kompleksitas kerja sama. Sebab selain melibatkan banyak institusi dengan berbagai kepentingan institusi masing-masing, juga berkaitan dengan masalah kesehatan yang sangat krusial dan berimplikasi ke bidang lainnya. Oleh sebab itulah kerja sama global ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah.

### **Tantangan Diplomasi Bencana sebagai Media Kerja sama Luar Negeri**

WHO merilis data bahwa pada awal 2020 sampai dengan akhir 2021 terdapat 287.104.683 kasus Covid-19 yang telah dikonfirmasi dengan skala global (OCHA-Humanitarian Data Exchange, 2022). *The Director-General* WHO, Tedros Adhanom yang dideklarasikan pada 30 Januari 2020 bahwa Covid-19 pentingnya proyeksi dan prediksi penyelamatan kesehatan manusia dan keamanan manusia dari penyebaran Covid 19.

Tahap ancaman keamanan dari serangan Covid 19 adalah sangat berbahaya dan bagi negara yang memiliki populasi yang banyak justru berpotensi lebih massif penyebarannya (Huang, 2020). Lebih lanjut sehingga peran WHO, pemerintah, dan aktor lainnya sangat penting untuk melindungi masyarakat dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat agar tetap aman dan selamat. Karena Covid-19 berdampak krisis global baik saat penyebarannya atau kedepannya. Disisi lainya yaitu membuat krisis populasi dan ancaman sumber daya manusia (Damme, 2020).

Ada beberapa tantangan diplomasi bencana khususnya menyangkut isu kesehatan, yaitu sebagai berikut.

#### **1. Kerja sama global saat ini hanya berupa kontestasi dan kompetisi dari beberapa negara besar.**

Di antara yang terjadi adalah Amerika menuduh China sebagai sumber bencana kesehatan ini. Bahkan dalam pidatonya, Donald Trump menuding China sebagai negara penyebab virus tersebut. China kemudian menanggapi tuduhan itu. Namun, ketegangan di antara kedua pihak merupakan lanjutan dari konflik masa lalu di bidang perdagangan, politik, dan militer.

Akibat dari ketegangan di antara dua negara besar ini, kerja sama global tidak simetris yang menyebabkan tidak ada pola kerja sama global untuk membentuk tim khusus penanganan Covid 19. Kedua negara membiarkan WHO dan negara-negara kecil berjuang sendirian menyelesaikan dan melawan bencana kesehatan ini. Alangkah baiknya jika negara-negara yang memiliki kemampuan keuangan yang besar, kemampuan teknologi yang baik, dan kepemilikan sumber daya manusia yang besar menjadi pihak yang terdepan dalam menjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sehingga kerja sama *knowledge-sharing* dapat terjadi.

Kasus lain adalah rivalitas antara kedua negara dalam produksi vaksin Covid 19. Vaksin yang diproduksi oleh Amerika Serikat dan Eropa yakni *Moderna* dan *Astrazeneca* begitu mudah

disertifikasi oleh WHO. Sedangkan *Sinovac* yang merupakan vaksin Covid 19 buatan China mendapatkan propaganda negatif.

Sikap negatif terhadap China sudah diawali sejak merebaknya bencana Covid 19 di Wuhan dimana negara-negara Eropa mengancam ketidakmampuan China dalam mengontrol bencana kesehatan tersebut. Apalagi ada kecurigaan soal terjadinya kebocoran laboratorium yang ada di Wuhan. Situasi inilah yang disebut sebagai bencana kesehatan karena negara-negara *great power* justru memanfaatkan bencana kesehatan ini untuk memperlebar konflik. Seharusnya dengan adanya bencana kesehatan ini diplomasi bencana lebih digalakkan seperti yang pernah dilakukan China ketika merebaknya virus flu babi dan flu burung.

Lebih lanjut, hal tersebut dapat diargumentasikan bahwa tulisan ini menjadi anti-tesis dari tulisan Ilan Kelman bahwa bencana akan memunculkan kepekaan dan kesadaran sehingga konflik yang terjadi antar negara akan mereda. Namun, fakta yang terjadi antara China dan Amerika Serikat justru adanya bencana kesehatan ini, diplomasi bencana tidak berfungsi sebagai instrumen meredakan konflik dan menciptakan perdamaian diantara kedua negara. Masing-masing negara justru saling berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, sosial dan politik melalui produk kesehatan.

Kemudian, jika melihat mekanisme penyelesaian bencana H5N1 yang di antaranya memberikan kompensasi terhadap *stockholders* terkait, *treatment* dan simulasi yang sama harus juga digunakan dalam menghadapi pandemi Covid 19. Misalnya, perlu ada pemberian insentif kepada garda terdepan pencegah dan yang menyembuhkan Covid 19. Tentunya ini sudah dilakukan di Indonesia dengan memberikan insentif yang besar bagi tenaga kesehatan, dokter atau lembaga terkait yang berinteraksi langsung dengan penanganan Covid 19. Bahkan sebagian dana kementerian dan lembaga di Indonesia dipotong untuk mendukung pemberantasan penyebaran Covid 19 yang lebih luas.

Lebih lanjut jika dilihat dalam skema analisis kerja sama kesehatan global maka sikap dan sifat negara harus lebih kooperatif sebab isu ini bersifat kemanusiaan. Sehingga, pola kerja sama globanya harus mengutamakan negosiasi, instrumen resolusi, dinamika yang sering berubah dan pengalaman sejarah. Selain itu, harus dilihat keterlibatan masyarakat sipil, diplomasi publik dan aktor lainnya sebagai pendukung kerja sama. Aktor utama seperti WHO, UN, G8 dan lainnya yang terlibat bisa menjadi regulator, eksekutor dan mediator dalam kontestasi keselamatan dan keamanan akibat bencana kesehatan global. Keterlibatan aktor-aktor tersebut dengan membawa motivasi altruisme, bencana kesehatan global bisa diselesaikan secara multilateral dan persuasi. Poin utamanya adalah *sharing knowledge* sebagai bentuk sosialisasi penyelesaian atau pengetahuan baik untuk institusi atau masyarakat umum.

## 2. Tantangan persepsi dan koordinasi

Pada bagian ini berhubungan dengan informasi yang diterima oleh masyarakat tentang Covid 19. Persepsi itu bermula dari kata, menjadi makna hingga menjadi kesalahan makna. Informasi yang banyak khususnya yang diterima melalui internet membuat penyebaran Covid 19 menjadi massif. Informasi yang diterima masyarakat yang menganggap Covid hanyalah flu biasa, senjata biologi, konspirasi dan berita hoaks lainnya. Implikasinya, logika berfikir masyarakat menjadi terpecah karena tidak satu pemahaman terkait Covid 19.

Studi yang dilakukan di Indonesia menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang membuat penyebaran Covid 19 semakin masif di Indonesia, yakni a) ketidakharmonisan antara institusi kesehatan yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memaknai covid 19; b) kebijakan pemerintah yang tidak preventif, dimana pada awal kemunculan Covid 19 di Wuhan menteri kesehatan kala itu menyatakan bahwa penyakit itu terlalu jauh untuk menjangkau Indonesia; c) kontestasi antara pusat dan daerah, misalnya Pemrov DKI sering kali berbeda data dan berbeda kebijakan dalam

penanganan Covid 19. Bahkan ketika pusat belum bersiap menghadapi Covid 19, Gubernur DKI saat itu, Anies Baswedan, telah menyampaikan ada potensi bahwa Covid 19 akan tersebar di Indonesia karena hubungan antar masyarakat itu terglobalisasi; e) peran tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak memberikan pengetahuan secara aktif. Bahkan ditemukan doktrin-doktrin pengetahuan keagamaan yang masih tetap memaksakan agar ibadah dilaksanakan dalam kondisi normal. Padahal dalam kondisi darurat seharusnya fleksibilitas ibadah bisa dilakukan.

### 3. Ketersediaan sumber daya dan finansial

ASEAN merespon penyebaran Covid 19 melalui pertemuan pertama kali dalam *ASEAN-China Foreign Minister's Meeting* pada 20 Februari 2020 secara *online*. Pertemuan ini dipimpin oleh Indonesia yang intinya membahas tentang pentingnya tata kelola kebijakan kesehatan untuk menangkai penyebaran Covid 19. Selain itu, *ASEAN plus three* melakukan pertemuan pada 14 April 2020 untuk meminta komitmen bersama untuk pengelolaan pandemi Covid-19 agar terkendali, dan meminimalisir implikasi yang merugikan terhadap stabilitas nasional maupun regional.

Hasil pertemuan tersebut didapatkan komitmen dan kesiapan negara-negara ASEAN untuk berkolaborasi dalam menangkai penyebaran Covid 19 (Kibtiyah, 2021). Singapura dan Thailand menerapkan *local city lockdown*, sedangkan Indonesia, Vietnam, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Laos menerapkan *rapid test* dan *social distancing*. Hal tersebut karena pemerintah dari negara-negara ASEAN memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, dan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional maupun regional (Kibtiyah, 2021).

Di sisi lain Indonesia, Myanmar, dan Filipina, yang cenderung lambat dalam penanganan Covid 19. Keterbatasan sumber daya dan finansial menjadi alasan utama dalam tata kelola kesehatan di beberapa negara tersebut. Misalnya tata kelola kesehatannya (Varin, 2022). Dan WHO mengeluarkan EUL (*Emergency Use Listing*) untuk vaksin Covid-19 yang sudah berlisensi secara global untuk diberikan kepada masyarakat. Vaksin Covid-19 tersebut meliputi *Pfizer-BioNTech*, *AstraZeneca*, *Johnson & Johnson*, *Moderna*, *Sinopharm*, *Sinovac*, *COVAXIN*, *Covovax*, dan *Nuvaxovid*.

Vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu cara efektif dari untuk mencegah penyebaran Covid 19 dalam keadaan darurat kesehatan global atas ancaman keamanan kesehatan dari bahayanya penularan Covid-19. Vaksinasi Covid-19 dilakukan untuk meningkatkan *herd immunity* (*World Health Organization*, 2021).

Kemudian Indonesia melalui surat resmi *Expression of Interest* pada tanggal 16 Oktober 2020 melalui *press briefing* melalui *online* oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, bahwa Indonesia bergabung kedalam *Covax Facility* (Media Indonesia, 2020). Dan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan *Covax Facility* merupakan kerja sama multilateral, yang dimana terdapat negara-negara dan aktor lain yang ikut terlibat didalam *Covax Facility*. Vaksin yang akan didapat Indonesia dari *Covax Facility* 20 persen dari jumlah populasi yang ada di Indonesia, dan didapatkan dengan bebas biaya (CNN Indonesia, 2020). Pada tanggal 8 Maret 2021 vaksin tahap pertama yang diberikan sampai ke Indonesia dengan jenis *AstraZeneca* sebanyak 1,1 juta dosis (Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021) (Dewi, 2022).

Selain itu, Indonesia termasuk salah satu negara yang aktif berpartisipasi menjadi anggota *Global Health Security Agenda* (GHSA) dengan menjadi *Permanent Steering Group Members* periode 2019-2023 bersama 9 anggota lainnya sebagai penggerak dan Ketua Troika GHSA 2016. Pada Pertemuan Tingkat Menteri GHSA ke-5, Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertemuan tahunan dan pertemuan tertinggi itu. Pertemuan yang dilaksanakan di Bali itu menjadi momentum penyelesaian pekerjaan rumah untuk mengimplementasikan *International Health Regulation* (IHR) tahun 2015 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2018).

Indonesia juga berkesempatan menjadi tuan rumah ASEAN *Health Minister's Meeting* ke-15 sekaligus didaulat menjadi ketua pada periode 2020-2021. Keketuaan ini menggagas tema “*Advancing the Achievement of ASEAN Health Development*” dengan memiliki dua topik bahasan yaitu pengaturan tentang pengakuan sertifikat vaksin Covid-19 serta membangun ketahanan sistem kesehatan dan percepatan pemulihan Covid-19 di kawasan.

#### 4. Kontrol Media dan Berita

Komunikasi memiliki peran krusial selama masa pandemi Covid-19, terutama saat organisasi kesehatan internasional, *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global. Dengan diadakannya program *social distancing*, dimana semua kegiatan dilaksanakan secara *online* baik dalam dunia pendidikan hingga kerja, media dan berita telah menjadi tombak informasi yang paling kuat.

Penggunaan teknologi digital mengalami peningkatan selama terjadinya Covid-19, tidak hanya untuk menjalani kegiatan sehari-hari seperti belanja atau bekerja, namun juga diutamakan untuk mencari informasi mengenai keadaan dunia selama pandemi. Salah satu hal baik yang muncul dari penyebaran virus corona tidak hanya berada di meningkatnya kerja sama internasional, namun juga memaksa negara-negara untuk lebih memberdayai dan mengedepankan teknologi. Saat ini penggunaan teknologi telah menjadi kebutuhan primer yang memegang peran penting dalam segala aspek kehidupan (Munawas, Herdiana, Suharya, & Putri, 2021).

Informasi mengenai pandemi kerap didapatkan melalui berbagai platform di internet, salah satunya adalah media sosial, seperti *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*. Informasi juga dapat ditemukan melalui laman *website* berita yang banyak dapat ditemukan di internet dengan mudah.

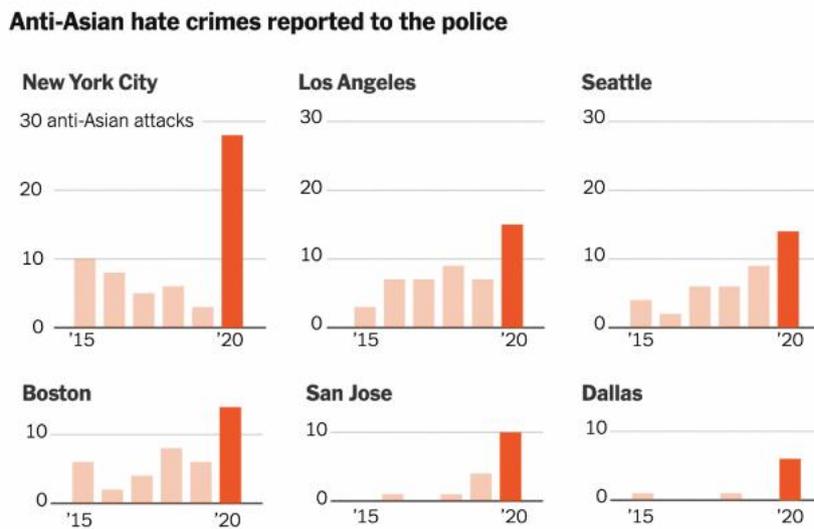
Di satu sisi, kemudahan tersebarnya informasi mengenai pandemi membawa dampak baik. Namun juga dapat menimbulkan kerugian dan efek negatif, misalnya terkait penyebaran berita palsu (hoaks) hingga menciptakan konflik dapat terjadi apabila penggunaan media tidak diawasi secara penuh dan dilakukan dengan tujuan baik (Sasmita, Yasri, & Pitaloka, 2022).

Cepatnya penyebaran berita yang diluncurkan melalui internet baik dari media sosial, televisi dan mudahnya tiap orang untuk menjadi *publisher* menghasilkan minimnya masyarakat yang dapat membedakan berita asli dan berita palsu (Posetti, Ireton, & Wardle, 2018). Penyebaran berita palsu secara umum digunakan untuk menimbulkan kebingungan masyarakat umum hingga melakukan manipulasi terhadap suatu informasi yang tidak sesuai dengan fakta.

Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China, juga tidak lepas dari pemberitaan hoaks yang mengakibatkan dampak sosial, misalnya meningkatnya sikap-sikap *anti-Asian racism* dan *xenophobia*, khususnya di Amerika Serikat. Hal ini tak lepas dari sikap Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, yang menyebut “*Chinese Virus*.”

Dilaporkan bahwa angka kriminalitas yang berdasarkan kebencian pada kaum Asia di Amerika mencapai 10.905 kasus selama Maret 2020 hingga Desember 2021. Dalam gambar berikut ini dapat dilihat statistik kasus-kasus tersebut.

Gambar 5. *Anti-Asian Hate Crimes Reported in 2021*



Sumber: *Data Innovation* (Chansirik, 2021)

Rivalitas antara Amerika dan China sebenarnya telah berlangsung lama, jauh sebelum pandemi, baik dalam sektor ekonomi, politik dan militer. Ketegangan antara kedua negara ini bahkan berdampak bagi dunia internasional dalam jangka panjang. Perseteruan ini bermula ketika Amerika menyebut bahwa imigran yang datang dari China adalah sebuah ancaman hingga usaha Amerika untuk menghentikan penyebaran kekuasaan China di dunia perdagangan (Lippert & Perthes, 2020). Tingginya *Asian-hate* yang lebih dituju kepada China selama pandemi tidak hanya karena penyebaran virus pertama terjadi di negara tersebut, namun terkait dengan upaya Amerika untuk menurunkan pandangan dunia terhadap China sehingga Amerika menjadi pusat perhatian dunia.

### Upaya Diplomasi Bencana

Di antara forum yang ada untuk melaksanakan diplomasi bencana adalah *Foreign Policy and Global Health* (FPGH). FPGH hadir sebagai forum multilateral atas kebutuhan dunia dalam menghadapi masalah kesehatan global yang juga merupakan hasil dari deklarasi Oslo tahun 2007 yang menjadi langkah pertama sinergi antara politik luar negeri dan kebijakan kesehatan global. Terdapat cita-cita untuk memperkuat komitmen bersama atas isu kesehatan dan meningkatkan kepedulian terhadap ancaman global melalui kacamata politik luar negeri.

FPGH didasarkan pada 3 agenda besar, yaitu persiapan kapasitas untuk keamanan kesehatan global, menghadapi ancaman keamanan kesehatan global, dan membuat globalisasi dapat dirasakan seluruh manusia. Pada tahun 2020, Indonesia terpilih menjadi ketua FPGH dengan slogan "*Affordable Healthcare For All.*" Keketuaan Indonesia tersebut sebagai salah satu cara agar negara-negara di dunia, khususnya negara anggota FPGH menerapkan sistem kesehatan yang setara bagi warganya untuk menciptakan pertahanan atas keamanan kesehatan nasional maupun global (Alfiana, 2022).

Terdapat tiga kategori interaksi seputar masalah kesehatan global, yaitu *core diplomacy*, *multistakeholder diplomacy*, dan *informal diplomacy* (Katz et al. 2011). Komitmen FPGH dalam kesehatan global dijalankan atas tiga area yang telah diidentifikasi berdasarkan jenis posisi kebijakan. Pertama, FPGH mempersiapkan kapasitas untuk keamanan kesehatan global melalui aksi kolaboratif para menteri luar negeri dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat, baik yang diakibatkan oleh alam maupun manusia.

Kedua, menghadapi ancaman kesehatan global. Para pembuat kebijakan secara mendalam akan mengidentifikasi ancaman yang datang seperti konflik, bencana alam, lingkungan, serta HIV/Aids.

Tindakan tersebut akan mengenali potensi dengan adanya “jaringan pengetahuan global” yang melintasi batas negara.

Ketiga, FPGH berkomitmen untuk membuat globalisasi dapat dirasakan oleh seluruh manusia melalui pemerintahan untuk keamanan kesehatan global melalui tata kelola. Tata kelola kesehatan merupakan penguatan demokrasi global yang melahirkan mekanisme dan aliansi baru di institusi regional maupun global. Dalam menanggapi masalah keamanan kesehatan dilandasi dengan hak-hak asasi manusia dan norma-norma yang terikat hukum. Karena secara global setiap lapisan masyarakat berhak mendapatkan kesetaraan untuk mendapatkan akses kesehatan yang baik. Hal tersebut menjadi bukti nyata secara substantif, karena telah mendukung hak-hak asasi manusia atas kesehatan masyarakat. Namun, tidak melupakan juga tentang kesetaraan hak asasi manusia terhadap negara-negara yang tergolong memiliki pendapatan ekonomi menengah ke bawah, yang mana untuk mengatasi terjadinya ketidaksetaraan dalam tata kelola global kesehatan yang baik (Fukuda-Parr S, 2021).

## **KESIMPULAN**

Penyebaran virus Covid 19 di berbagai negara merupakan bagian dari sebuah peluang dan tantangan. Jika dimaknai Covid 19 sebagai bencana global maka sebenarnya peristiwa penyebaran virus bukanlah pertama kali dialami oleh negara-negara di dunia. Sebelumnya pernah ada virus Ebola, Flu Burung, Flu Babi, Antraks yang menjadi bencana global. Penyebaran virus merupakan bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia atau menjadi bagian dari bioterorisme global. Bencana tersebut harus bisa disikapi secara bijaksana karena penyebaran virus bukanlah kemauan setiap negara.

Merebaknya bencana virus Covid 19 menjadi peluang karena membuka peluang kerja sama global dalam berbagai bidang kehidupan khususnya bidang kesehatan global. Kemudian dengan adanya bencana tersebut tercipta sikap pluralisme global dan solidaritas sebagai bentuk nilai kosmopolitanisme. Negara-negara berpeluang untuk saling membantu dan berbagi dengan kelebihan yang dimiliki. Sebab dengan saling berbagi ini penyebaran virus Covid 19 dapat ditekan. Kerja sama global ini penting karena setiap negara menyadari penyebaran virus tersebut melintasi batas negara dan berimplikasi terhadap stabilitas negara. Peluang lainnya adalah pergeseran ke arah digitalisasi yang membuat sistem internasional sangat memanfaatkan internet dan artinya negara-negara harus terus berinovasi agar tetap bisa menjamin kehidupannya.

Di sisi lainnya adalah adanya tantangan kontestasi antar negara, perbedaan persepsi dan koordinasi serta kesiapan sumber daya dan biaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Kreativitas yang dilakukan negara-negara melalui pertemuan *online* menjadi komitmen bersama secara global untuk memberantas Covid 19 secara altruisme. Dengan menjaga stabilitas kesehatan global, nasional, dan regional, siklus hubungan internasional akan berjalan lancar. Oleh sebab itulah diplomasi bencana penting dilakukan agar kerja sama global dalam bidang kesehatan dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.N, Z. (2022). *STRATEGI INDONESIA DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19 MELALUI FOREIGN POLICY AND GLOBAL HEALTH INITIATIVES TAHUN 2020*. Jakarta: UPN Veteran Jakarta.
- Arnakim, L. Y., & Kibtiah, T. M. (2020). Response of ASEAN member states to the spread of COVID-19 in Southeast Asia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.
- Babulal Sethia, P. K. (2019). *Essentials of Global Health*. Poland: Elsevier.
- Badan Penanggulangan Bencana Nasional. (n.d.). Retrieved from Definisi Bencana: <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana>

- Bakarekar, W. S., & Fathun, L. M. (2018). Book Review DISASTER DIPLOMACY “How Disaster Affect Peace and Conflict “. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 323-336.
- Carlsnaes, W., Risse, T., & Simmons, B. A. (2013). *Handbook hubungan internasional*. Bandung: Nusamedia.
- Chansirik, C. (2021, April 5). *Visualizing Anti-Asian Violence in the United States*. Retrieved from Data Innovation: <https://datainnovation.org/2021/04/visualizing-anti-asian-violence-in-the-united-states/>
- Christian, M., & Hidayat, F. (2020). Dampak Coronavirus Terhadap Ekonomi Global. *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional*.
- Colin McInnes, K. L. (2012). *Global Health International Relations*. Cambridge: Polity Press.
- Comfort, L. K. (2002). Disaster: Agent of diplomacy or change in international affairs? *Disaster diplomacy Journal*.
- Consilium Europa*. (2023, Januari 12). Retrieved from An international treaty on pandemic prevention and preparedness: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/>
- Covid 19 Indonesia*. (2023, Januari 21). Retrieved from Data Sebaran: <https://covid19.go.id/>
- Damme, W. V. (2020). The COVID-19 pandemic: diverse contexts; different pandemics-how and why? *BMJ Global Health*, 1-16.
- Daveis, S. E. (2015). *Disease Diplomacy: International Norms and Global Health Security*. USA: John Hopkins University.
- Dewi, P. C. (2022). *DIPLOMASI KESEHATAN GLOBAL INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN KESEHATAN DI INDONESIA MELALUI COVAX FACILITY (2020-2021)*. Jakarta: UPN Veteran Jakarta.
- Fathun, L. M. (2016). Bencana Hutan dalam Hubungan Internasional. *Andalas Journal of International Studies*, 84-107.
- Fathun, L. M., & Situmeang, N. (2021). Concept Of Global Health Diplomacy In International Relations. *AEGIS*, 1-19.
- Febreani, Y. K. (2015). Penguatan Kerja sama ASEAN Plus Three (APT) untuk Penanganan dan Mitigasi Dampak Negatif Ekonomi dari Pandemi Covid-19. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Fukuda-Parr, S., Buss, P., & Yamin, A. E. (2021). *Pandemic treaty needs to start with rethinking the paradigm of global*. *BMJ Global Health*. *BMJ Global Health*.
- Huang, J. (2020, November 30). *Global prediction system for COVID-19 pandemic*. Retrieved from National Library of Medicine: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7396206/>
- Iлона Kickbusch, G. L. (2013). *Global Health Diplomacy Concept, Issue, Actors Instrument, Fora and Cases*. New York: Springer.
- Kelman, I. (2012). *Disaster Diplomacy: How Disasters Affect Peace and Conflict*. New York: Routledge.
- Lippert, B., & Perthes, V. (2020). Strategic rivalry between United States and China: causes, trajectories, and implications for Europe. *Stiftung Wissenschaft und Politik*.
- Lister, G., Kickbusch, I., Told, M., & Drager, N. (2013). *Global Health Diplomacy: Concepts, Issues, Actors, Instruments, Fora and Cases*. New York: Springer.
- Lister, T., Shukla, S., & Bobille, F. (2020, April 5). *CNN*. Retrieved from Coronavirus sparks a ‘war for masks’ in desperate global scramble for protection: <https://edition.cnn.com/2020/04/04/europe/coronavirus-masks-war-intl/index.html#:~:text=As%20the%20coronavirus%20pandemic%20spreads,to%20whom%20are%20still%20murky>.
- McInnes, C. J., & Lee, K. (2012). *Global Health and International Relations*. Cambridge: Polity Press.
- Moodie, A., Gerami, N., & D'Alessandra, F. (2021). *RETHINKING HEALTH SECURITY AFTER COVID-19*. Oxford: University of Oxford.
- Munawas, Z., Herdiana, Y., Suharya, Y., & Putri, N. I. (2021). PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DI MASA PANDEMI COVID-19. *Tematik : Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi*, 160-175.
- Nikogosian, H., & Kickbusch, I. (2021, Februari 25). *The BMJ*. Retrieved from The Case for an International Pandemic Treaty: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n527>
- OCHA., O.-H. D.-1. (2022).

- Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19 di Indonesia.* (2022, Januari 5). Retrieved from JDIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI: <https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia#:~:text=JDIH%20Marves%20%E2%80%93%20Pandemi%20dan%20penyebaran,Tahun%202020%20tentang%20Penetapan%20Kedaruratan>
- Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi Global 2020.* (n.d.). Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/sosialekonomiglobal>
- Posetti, J., Ireton, C., & Wardle, C. (2018). *JOURNALISM, 'FAKE NEWS' & DISINFORMATION*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Ramraj, V. V. (2021). *Covid in Asia: Law and Policy Contexts*. New York: Oxford University Press.
- Rokom. (2020, Januari 20). *Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama 7 Bidang Kesehatan*. Retrieved from Sehat Negeriku Sehatlah Bangsa: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201019/3735460/indonesia-jepang-sepakati-kerja-7-bidang-kesehatan/>
- Sara E Davies, A. K.-S. (2015). *Disease Diplomacy INTERNATIONAL NORM AND GLOBAL HEALTH SECURITY*. USA: John Hopkins University.
- Sasmita, R., Yasri, A. S., & Pitaloka, A. A. (2022). The impact of social media on the spread of hoax news in the community during the covid-19 pandemic. *International Conference on Education*, 8-15.
- Taghizade, S., Chattu, V. K., Jafaaripooyan, E., & Kavany, S. (2021, Juli 12). *COVID-19 Pandemic as an Excellent Opportunity for Global Health Diplomacy*. Retrieved from Frontiers: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.655021/full>

## **BIOGRAFI**

**Laode Muhamad Fathun** adalah seorang dosen pada program Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UPN Veteran Jakarta. Memiliki ketertarikan dalam bidang kebijakan luar negeri, diplomasi dan negosiasi serta keamanan maritim.

**Mega Dwifarhani** merupakan mahasiswa di UPN Veteran Jakarta dengan jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Memiliki ketertarikan dalam mengkaji dan proses diplomasi dan konflik serta resolusi konflik diplomasi internasional.